

**DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA MENGHADAPI
RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE (RED II) UNI EROPA
TERKAIT MINYAK KELAPA SAWIT**

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas*

Oleh:

**RIRIN PUTRI VILANSIA
2110852021**



Dosen Pembimbing:

**Dr. Sofia Trisni, S.IP., MA(IntRel)
Rifki Dermawan, S.Hum, M.Sc**

**DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

2025

ABSTRAK

Renewable Energy Directive (RED II) Uni Eropa yang secara resmi diberlakukan pada 11 Desember 2018 menyebabkan pembatasan ekspor minyak kelapa sawit karena dianggap sebagai penyebab utama deforestasi dan perubahan iklim. Kebijakan ini melahirkan keberatan dari Indonesia sebagai negara yang menyumbang 62% dari produksi minyak kelapa sawit global, terutama karena industri kelapa sawit ini telah menjadi sumber pendapatan Indonesia terbesar dari sektor ekspor pertanian dalam satu dekade terakhir. Diplomasi ekonomi Indonesia dalam hal ini dipertanyakan karena telah menjadi prioritas utama politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi RED II Uni Eropa terkait minyak kelapa sawit dengan menggunakan kerangka konseptual diplomasi ekonomi menurut Kishan S. Rana. Rana menjelaskan tahapan diplomasi ekonomi terdiri dari *economic salesmanship*, *economic networking and advocacy*, *image building*, dan *regulatory management and resource mobilization*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dari literatur seperti artikel jurnal, laporan, dan *web page*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia melakukan promosi ekspor ke negara-negara konsumen besar dan pengembangan pasar potensial baru. Indonesia juga membentuk kemitraan antar instansi dan aktor serta keterlibatan dalam forum multilateral. Tidak hanya itu, Indonesia melakukan berbagai kampanye dan framing positif melalui promosi ISPO dan keberadaan slogan #SawitBaik. Indonesia juga melakukan negosiasi perjanjian internasional melalui gugutan ke WTO dan perumusan sertifikasi ISPO dan kebijakan pelarangan ekspor nikel.

Kata Kunci: RED II; Diplomasi Ekonomi; Uni Eropa; Indonesia; Minyak Kelapa Sawit (CPO)



ABSTRACT

The European Union's Renewable Energy Directive (RED II), which officially came into effect on December 11, 2018, led to restrictions on palm oil exports as it is considered a major cause of deforestation and climate change. This policy led to objections from Indonesia as a country that accounts for 62% of global palm oil production, especially since the palm oil industry has become Indonesia's largest source of income from the agricultural export sector in the past decade. Indonesia's economic diplomacy has been questioned as it has been the top priority of Indonesia's foreign policy during President Joko Widodo's administration. This research aims to explain Indonesia's economic diplomacy in dealing with the European Union's RED II related to palm oil by using the conceptual framework of economic diplomacy according to Kishan S. Rana. Rana explains the stages of economic diplomacy consist of economic salesmanship, economic networking and advocacy, image building, and regulatory management and resource mobilization. This research uses a qualitative method with literature study data collection techniques through literature such as journal articles, reports, and web pages. The results showed that Indonesia promotes exports to major consumer countries and develops new potential markets. Indonesia also formed partnerships between agencies and actors as well as involvement in multilateral forums. At the same time, Indonesia conducted various campaigns and positive framing through the promotion of ISPO and the existence of the #SawitBaik slogan. Indonesia also negotiated international agreements through a lawsuit to the WTO and the formulation of ISPO certification and nickel export ban policies.

Keywords: *RED II; Economic Diplomacy; European Union; Indonesia; Crude Palm Oil (CPO)*

